

**RENCANA KERJA  
PERUBAHAN  
TAHUN 2023**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

## **KATA PENGANTAR**

**P**uji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran Tahun 2023 yang merupakan rencana kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

**R**encana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan demikian rencana kerja perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dan RKPD dan Renstra Perubahan 2021-2026.

**R**encana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sampai dengan bulan Juni 2023 atau di TW II, renja kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2023.

**K**ami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2023 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, Agustus 2023  
Kepala Dinas,

Drs. AHMAD YANI  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19670312 199203 1 004

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW. II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

Salah satu misi pembangunan Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar yang tercantum dalam RKPD yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan akuntabel dan transparan, yaitu Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas dengan tujuan Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah. Sasaran dari misi tersebut adalah Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan. Prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar TAHUN 2023 adalah Peningkatan kualifikasi desa dan Sumber Daya Manusia untuk pembangunan yang lebih merata melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

Prioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Keterkaitan Renja OPD dengan Renstra OPD, dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD OPD) setiap tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 serta menjadi dasar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005– 2025;
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
  19. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.
  20. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
  21. Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional;
  22. Keputusan Kepala BPS Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar;
  23. Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral;

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 113);
29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026.
30. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 683).



### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2023 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Program dan Kegiatan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

Rencana Kerja Perubahan ini didasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 dan Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2021-2026, yang merupakan cerminan dari visi dan misi Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar.

#### **2. Tujuan**

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah untuk :

- a. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2023 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD
- b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
- c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
- d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian

target kinerja program dan kegiatan

- e. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan yang lebih profesional
- f. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan kebijakan pengawasan internal.
- g. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

BAB I PENDAHULUAN, memuat :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sitematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DiskominfoSP Sampai dengan Triwulan II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah pada **tabel 2.1**.

2.2 Analisis Kinerja Pelayan DiskominfoSP

Memuat kompilasi pencapaian kinerja pelayan OPD Tahun berjalan sampai dengan Triwulan II

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DiskominfoSP

Memuat kompilasi penjabaran isu-isu penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, permasalahan dan peluang OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

### BAB III RENCANA DAN PENDANAAN OPD

Memuat Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja, dan Rekapitulasi Perubahan Renja dan Pendanaan OPD ***tabel 3.1***

### BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sampai dengan Triwulan II

LAPORAN EVALUASI TERHADAP RKP  
KABUPATEN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV				13=9+10+11+12				14=7+13		15=14/6x100	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Setiap Urusan Pemerintahan			Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Setiap Urusan Pemerintahannya	90 %	4.523.906.915	30 %	1.263.170.200	50 %	1.169.600.300																		
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan sistem informasi terkait program kebijakan pemerintah yang berkualitas	100,00 %	4.523.906.915	0,00 %	1.263.170.200	100,00 %	1.169.600.300																		
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Komunikasi Publik yang Dikelola	100,00 %	4.523.906.915	17,14	1.263.170.200	100,00 %	1.169.600.300	16,67%	53.866.000	0,00%	426.635.459	0,00 %	0	0,00 %	0	16,67%	480.501.459	20,48 %	1.743.671.659	20,48 %	38,54%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN			

N																											
		2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (Dokumen)	5	137.187.750	1	7.573.000	1	14.054.000	0	2.650.000	0	8.955.459	0	0	0	0	0	11.605.459	1	19.178.459	20,00 %	13,98%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIA N	Belum Tercapai	
		2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	5	187.000.000	1	24.176.800	1	30.932.000	0	0	0	4.800.000	0	0	0	0	0	4.800.000	1	28.976.800	20,00 %	15,50%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIA N	Belum Tercapai	
		2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	5	2.675.638.065	1	867.460.000	1	867.085.300	0	0	0	350.080.000	0	0	0	0	0	350.080.000	1	#####	20,00 %	45,50%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIA N	Belum Tercapai	
		2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Dokumen)	5	1.229.081.110	1	292.988.600	1	205.623.000	0	51.216.000	0	56.400.000	0	0	0	0	0	107.616.000	1	400.604.600	20,00 %	32,59%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIA N	Belum Tercapai	
		2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media (Layanan)	35	140.000.000	1	45.000.000	7	17.010.000	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	8	45.000.000	22,86 %	32,14%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIA N	Tercapai	
		2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan (Dokumen)	5	155.000.000	1	25.971.800	1	34.896.000	0	0	0	6.400.000	0	0	0	0	0	6.400.000	1	32.371.800	20,00 %	20,89%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIA N	Belum Tercapai	
2	Meningkatnya Tingkat Kematangan Domain, Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE			Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	90 %	7.398.359.902	50 %	426.611.154	50 %	1.209.214.200																	
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara terintegrasi	100,00 %	7.398.359.902	0,00 %	426.611.154	100,00 %	1.209.214.200																	

		2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Domain yang Dikelola Pemerintah	100,00 %	3.082.663.172	20,00	25.543.000	100,00 %	913.113.200	0,00%	9.950.000	50,00 %	6.042.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50,00%	15.992.000	30,00 %	41.535.000	30,00 %	1,35%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIA N	
		2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	1.174.000.000	1	13.900.000	1	30.709.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13.900.000	20,00 %	1,18%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIA N	Belum Tercapai
		2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)	5	1.908.663.172	1	11.643.000	1	882.404.200	0	9.950.000	1	6.042.000	0	0	0	0	1	15.992.000	2	27.635.000	40,00 %	1,45%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIA N	Tercapai
		2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100,00 %	4.315.696.730	20,00	401.068.154	100,00 %	296.101.000	25,00%	27.045.275	0,00%	83.260.682	0,00 %	0	0,00 %	0	25,00%	110.305.957	25,00 %	511.374.111	25,00 %	11,85%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIA N	
		2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	915.000.000	1	174.220.400	1	15.703.000	0	1.178.000	0	10.441.912	0	0	0	0	0	11.619.912	1	185.840.312	20,00 %	20,31%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIA N	Belum Tercapai
		2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik (Dokumen)	5	654.436.730	1	18.202.800	1	34.833.000	0	0	0	23.554.520	0	0	0	0	0	23.554.520	1	41.757.320	20,00 %	6,38%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIA N	Belum Tercapai
		2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah (Dokumen)	5	1.106.260.000	1	154.107.954	1	189.703.000	0	25.867.275	0	45.064.250	0	0	0	0	0	70.931.525	1	225.039.479	20,00 %	20,34%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIA N	Belum Tercapai
		2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (Unit)	5	1.640.000.000	1	54.537.000	1	55.862.000	1	0	0	4.200.000	0	0	0	0	1	4.200.000	2	58.737.000	40,00 %	3,58%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIA N	Tercapai

3	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral			Persentase Data Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	90 %	1.787.406.821	70 %	197.703.494	75 %	108.632.500																
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100,00 %	1.787.406.821	0,00 %	197.703.494	100,00 %	108.632.500																
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100,00 %		0,00 %		100,00 %																	
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik Sektoral dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100,00 %	1.787.406.821	13,71	197.703.494	100,00 %	108.632.500	0,00%	20.108.124	0,00%	7.190.800	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00%	27.298.924	13,71 %	225.002.418	13,71 %	12,59%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	
		2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dokumen)	5	714.014.384	1	67.779.494	1	43.867.500	0	9.280.000	0	3.400.800	0	0	0	0	0	12.680.800	1	80.460.294	20,00 %	11,27%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	Belum Tercapai
		2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi (Orang)	320	262.537.000	21	23.885.000	64	20.784.000	0	1.646.000	0	0	0	0	0	0	0	1.646.000	21	25.531.000	6,56%	9,72%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	Belum Tercapai
		2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (Dokumen)	5	184.544.000	1	23.588.600	1	6.354.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23.588.600	20,00 %	12,78%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	Belum Tercapai	
		2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS (Orang)	70	184.109.361	11	8.037.000	14	10.368.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	8.037.000	15,71 %	4,37%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	Belum Tercapai	
		2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik (Unit)	5	264.274.000	0	57.356.400	1	15.736.000	0	9.182.124	0	3.790.000	0	0	0	0	0	12.972.124	0	70.328.524	0,00%	26,61%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	Belum Tercapai

		2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun (Dokumen)	5	177.928.076	1	17.057.000	1	11.523.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17.057.000	20,00 %	9,59%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	Belum Tercapai
4	Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah			Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat III Indeks	1.791.395.629	Tingkat I Indeks	624.258.199	Tingkat II Indeks	115.673.600																	
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase keamanan informasi pemerintah	100,00 %	1.791.395.629	0,00 %	624.258.199	100,00 %	115.673.600																	
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Area Keamanan Informasi yang Dievaluasi	99,00%	1.606.547.412	20,00	516.292.299	100,00 %	94.889.600	50,00%	0	0,00%	15.424.900	0,00 %	0	0,00 %	0	50,00%	15.424.900	30,00 %	531.717.199	30,00 %	33,10%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN		
		2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dokumen)	5	214.700.000	1	14.892.400	1	4.702.000	0	0	0	1.574.000	0	0	0	0	0	1.574.000	1	16.466.400	20,00 %	7,67%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	Belum Tercapai	
		2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	5	292.804.903	1	237.406.700	1	46.939.600	0	0	0	842.000	0	0	0	0	0	842.000	1	238.248.700	20,00 %	81,37%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	Belum Tercapai	
		2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	5	798.651.509	1	36.209.000	1	33.100.000	1	0	0	4.822.000	0	0	0	0	1	4.822.000	2	41.031.000	40,00 %	5,14%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	Tercapai	



		2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)	5	300.391.000	1	227.784.199	1	10.148.000	1	0	0	8.186.900	0	0	0	0	1	8.186.900	2	235.971.099	40,00 %	78,55%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	Tercapai
		2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pngamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah Dengan Persandian	100,00 %	184.848.217	20,00	107.965.900	100,00 %	20.784.000	100,00 %	0	0,00%	5.200.000	0,00 %	0	0,00 %	0	100,00 %	5.200.000	40,00 %	113.165.900	40,00 %	61,22%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	
		2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Perangkat Daerah)	5	184.848.217	1	107.965.900	1	20.784.000	1	0	0	5.200.000	0	0	0	0	1	5.200.000	2	113.165.900	40,00 %	61,22%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	Tercapai
5	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah			Nilai SAKIP. Laporan Keuangan sesuai SAP dan Indeks Kepuasan Masyarakat	A Angka	15.768.066.900	CC Angka	5.302.810.959	B Angka	3.402.067.164																
		2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Kinerja	72,31 %	15.768.066.900	0,00 %	5.302.810.959	70,28 %	3.402.067.164																
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan	95,00 %		0,00 %		85,00 %																	
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Diselesaikan Tepat Waktu	100,00 %	222.000.000	17,14	32.525.000	100,00 %	19.880.000	57,14%	4.000.000	14,29 %	6.950.000	0,00 %	0	0,00 %	0	71,43%	10.950.000	34,05 %	43.475.000	34,05 %	19,58%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	
		2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15	50.000.000	3	8.800.000	2	4.000.000	0	0	2	4.000.000	0	0	0	0	2	4.000.000	5	12.800.000	33,33 %	25,60%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	Tercapai
		2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5	26.000.000	1	2.975.000	1	2.000.000	1	2.000.000	0	0	0	0	0	0	1	2.000.000	2	4.975.000	40,00 %	19,13%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	Tercapai

		2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5	26.000.000	1	4.675.000	1	2.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4.675.000	40,00 %	17,98%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIA N	Tercapai
		2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5	24.000.000	1	2.975.000	1	2.000.000	1	2.000.000	0	0	0	0	0	0	1	2.000.000	2	4.975.000	40,00 %	20,73%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIA N	Tercapai
		2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5	24.000.000	1	4.225.000	1	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.225.000	20,00 %	17,60%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIA N	Belum Tercapai
		2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	20.000.000	0	0	3	3.630.000	1	0	0	1.150.000	0	0	0	0	1	1.150.000	1	1.150.000	25,00 %	5,75%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIA N	Belum Tercapai
		2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	52.000.000	2	8.875.000	3	4.000.000	2	0	0	1.800.000	0	0	0	0	2	1.800.000	4	10.675.000	40,00 %	20,53%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIA N	Belum Tercapai
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Pengelolaan Keuangan yang D diselesaikan Tepat Waktu	100,00 %	11.779.566,982	20,00	2.481.787,150	100,00 %	2.709.779,764	30,74%	607.054,331	29,26 %	753.129,274	0,00 %	0	0,00 %	0	60,00%	1.360.183,605	30,17 %	3.841.970,755	30,17 %	32,62%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIA N	
		2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	175	11.660.566,982	35	2.460.792,150	27	2.694.600,764	28	#####	26	750.625,274	0	0	0	0	54	#####	89	#####	50,86 %	32,75%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIA N	Melampaui
		2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5	31.400.000	1	8.395.000	12	7.000.000	0	0	0	2.504.000	0	0	0	0	0	2.504.000	1	10.899.000	20,00 %	34,71%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIA N	Belum Tercapai

		2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	25.500.000	1	4.500.000	1	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.500.000	20,00 %	17,65%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIA N	Belum Tercapai	
		2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	60	30.100.000	12	4.100.000	12	2.929.000	3	0	3	0	0	0	0	0	6	0	18	4.100.000	30,00 %	13,62%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIA N	Belum Tercapai
		2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	60	32.000.000	12	4.000.000	12	2.750.000	3	0	3	0	0	0	0	0	6	0	18	4.000.000	30,00 %	12,50%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIA N	Belum Tercapai
		2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/ Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Diselesaikan Tepat Waktu	99,00%	0	0,00	0	100,00 %	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00 %	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIA N	
		2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Memiliki Predikat Kinerja Sangat Baik	100,00 %	0	0,00	0	100,00 %	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00 %	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIA N	
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100,00 %	1.711.365.805	20,00	2.377.274.566	100,00 %	275.539.600	0,00%	44.806.360	0,00%	85.975.035	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00%	130.781.395	20,00 %	2.508.055.961	20,00 %	146,55%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIA N	
		2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	140.000.000	1	1.926.301,157	1	37.923.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	#####	20,00 %	1.375,93 %	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIA N	Belum Tercapai
		2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	160.000.000	1	246.663.800	12	48.903.600	0	0	0	33.713.600	0	0	0	0	0	33.713.600	1	280.377.400	20,00 %	175,24%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIA N	Belum Tercapai

		2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5	101.565.000	1	6.495.000	1	2.930.000	0	0	0	1.250.000	0	0	0	0	1.250.000	1	7.745.000	20,00 %	7,63%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	Belum Tercapai	
		2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	600	1.309.800.805	120	197.814.609	12	185.783.000	0	44.806.360	0	51.011.435	0	0	0	0	95.817.795	120	293.632.404	20,00 %	22,42%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	Belum Tercapai	
		2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	100,00 %	0	0,00	0	100,00 %	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	
		2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	1.624.627.113	20,00	205.447.931	100,00 %	270.957.800	0,00%	0	0,00%	71.313.968	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00%	71.313.968	20,00 %	276.761.899	20,00 %	17,04%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	
		2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5	122.332.876	1	21.417.800	12	28.234.000	0	0	0	5.767.000	0	0	0	0	5.767.000	1	27.184.800	20,00 %	22,22%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	Belum Tercapai	
		2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	149.912.637	1	49.322.731	1	64.300.000	0	0	0	20.159.768	0	0	0	0	20.159.768	1	69.482.499	20,00 %	46,35%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	Belum Tercapai	
		2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	1.352.381.600	1	134.707.400	1	178.423.800	0	0	0	45.387.200	0	0	0	0	45.387.200	1	180.094.600	20,00 %	13,32%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	Belum Tercapai	
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100,00 %	430.507.000	20,00	205.776.312	100,00 %	125.910.000	0,00%	3.765.000	0,00%	32.973.002	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00%	36.738.002	20,00 %	242.514.314	20,00 %	56,33%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	
		2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	171.615.000	1	41.278.360	5	45.270.000	0	3.765.000	0	12.397.502	0	0	0	0	16.162.502	1	57.440.862	20,00 %	33,47%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	Belum Tercapai	

	2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	50	197.379.000	10	113.962.352	17	75.890.000	0	0	0	20.575.500	0	0	0	0	20.575.500	10	134.537.852	20,00 %	68,16%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	Belum Tercapai
	2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	61.513.000	1	50.535.600	14	4.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.535.600	20,00 %	82,15%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	Belum Tercapai
<b>Total Target (RP)</b>									<b>6.005.187.764</b>	<b>Total Realisasi (RP)</b>									<b>2.264.690.210</b>					
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>Predikat kinerja</b>									<b>SR</b>	<b>SR</b>				

Pencapaian program dan kegiatan sampai dengan TW II ( sd Juni 2023) sebagai berikut : Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik.

Adapun evaluasi sampai dengan TW II (per 15 Juni 2023) Tahun 2022 dari Program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan yang telah memenuhi target/telah dilaksanakan
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dari target 3 Dokumen telah terealisasi 3 Dokumen yaitu Renja 2023, Renstra Perubahan 2021-2026 dan Renja 2024 atau 100 %, dan keuangan dari pagu Rp.4.000.000 telah terealisasi anggaran sebesar Rp.4.000.000 atau 100%;
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dari target 1 Dokumen telah terealisasi 1 Dokumen RKA SKPD Tahun 2023, dan keuangan dari pagu Rp.2.000.000 telah terealisasi anggaran sebesar Rp.2.000.000 atau 100%;
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, dari target 1 Dokumen telah terealisasi 1 Dokumen DPA SKPD Tahun 2023, dan Keuangan dari pagu Rp.2.000.000 telah terealisasi anggaran sebesar Rp.2.000.000 atau 100%.
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dari target 2 Dokumen telah terealisasi 2 Dokumen yaitu LKPJ Tahun 2022 dan LKPD Tahun 2022, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.000.000 tetapi baru terealisasi sebesar Rp. 1.800.000 atau 45 %
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dari target 1 Dokumen telah terealisasi 1 Dokumen yaitu LAKIP Tahun 2022, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.630.000 tetapi baru terealisasi sebesar Rp. 300.000 atau 8,26 %

- b. Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target karena belum dilaksanakan
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan alokasi anggaran Rp.2.000.000, belum ada realisasi anggaran, dan capaian kinerja dari target 1 Dokumen belum tercapai karena sub kegiatan belum dilaksanakan;
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran Rp.2.250.000, belum ada realisasi anggaran, dan capaian kinerja dari target 1 Dokumen belum tercapai karena sub kegiatan belum dilaksanakan;
  - Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.694.600.764 dan terealisasi sebesar Rp. 1.357.679.605 atau 50,39 %
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.504.000 atau 35,77 %.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.0 atau 0 %.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.929.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0 %.
  - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.750.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0 %.
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran alokasi sebesar Rp. 32.923.000 (Tiga Puluh Dua

Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0 %.

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran alokasi sebesar Rp. 48.903.600 (empat puluh delapan juta Sembilan ratus tiga ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 33.703.600 atau 68,94 %.
- Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran Rp. 2.930.000 (dua juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.250.000 atau 42,66 %.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 185.783.000 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 95.817.795 atau 51,58 %.
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.234.000 (dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 5.767.000 atau 20,43 %.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 64.300.000 (enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 20.159.768 atau 31,35 %.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 178.423.800 (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 45.387.200 atau 25,44 %.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.270.000 (empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 16.162.502 atau 35,70 %.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



- dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.890.000 (tujuh puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 20.575.500 atau 27,11 %.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 39.396.717 (tiga puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 39.396.000 atau 99,99 %.
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.750.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0 %.
  - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.054.000 (empat belas juta lima puluh empat ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 11.605.459 atau 82,58 %.
  - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.932.000 (tiga puluh juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.4.800.000 atau 15,52 %.
  - Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan alokasi anggaran Rp.867.085.300 (delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 350.080.000 atau 40,37 %.
  - Pelayanan Informasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 205.623.000 (dua ratus lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 107.616.000 atau 52,34 %.
  - Layanan Hubungan Media dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.010.000 (tujuh belas juta sepuluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0 %.
  - Kemitraan dengan Pemangku kepentingan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.896.000 (tiga puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dan

teralisasi sebesar Rp. 6.400.000 atau 18,34 %.

- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.709.000 (tiga puluh juta tujuh ratus Sembilan ribu rupiah) dan teralisasi sebesar Rp. 0 atau 0 %.
- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 882.404.200 (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat ribu dua ratus rupiah) dan teralisasi sebesar Rp. 15.992.000 atau 1,81 %.
- Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.703.000 (lima belas juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) dan teralisasi sebesar Rp. 11.619.912 atau 74,00 %.
- Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.833.000 (tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan teralisasi sebesar 23.554.520 atau 67,62 %.
- Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 189.703.000 (seratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) dan teralisasi sebesar Rp. 70.931.525 atau 37,39 %.
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.862.000 (lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan teralisasi sebesar Rp. 4.200.000 atau 7,52 %.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.867.500 (empat puluh tiga

juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 12.680.800 atau 28,91 %.

- Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.784.000 (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.646.000 atau 7,92 %.
- Membangun Metadata Statistik Sektorial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.354.000 (tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 25.588.600 atau 70,91 %.
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektorial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.368.000 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0 %.
- Pengembangan Infrastruktur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.736.000 (lima belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 12.972.124 atau 82,44 %.
- Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektorial di Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.523.000 (sebelas juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0 %.
- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.702.000 (empat juta tujuh ratus dua ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.574.000 atau 33,48 %.
- Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.939.600 (empat puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 842.000 atau 1,79 %.

- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.100.000 (tiga puluh tiga jta seratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 4.882.000 atau 14,57 %.
  - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.148.000 (sepuluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 8.186.900 atau 80,68 %.
  - Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.784.000 (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 5.200.000 atau 25,02 %.
- c. Sub Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun berjalan. Sampai dengan triwulan II, tidak terdapat sub kegiatan yang tidak dilaksanakan.

**2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**

**Tabel 2.2.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Sttaistik dan Persandian Tahun 2023  
Sampai Triwulan II**

No	Indikator Kinerja Utama	SPM	IKK	Target Kinerja Capaian Renstra	Realisasi Capaian	Catatan Analisis
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nilai SAKIP	-		CC	42,52 / C	Hasil evaluasi SAKIP tahun 2022
2.	Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP	-		Sesuai	Sesuai	Hasil penilaian BPK terhadap laporan keuangan
3.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DiskominfoSP	-		72,50	75,13	Hasil penilaian survey kepuasan masyarakat terhadap layanan bidang komunikasi, informasika, statistic dan persandian
4.	Persentase perangkat daerah yang mampu menerapkan digitalisasi pelayanan publik	-		50	70,27	Jumlah perangkat daerah yang mampu menerapkan digitalisasi pelayanan public .....x 100 % Jumlah Perangkat Daerah
5.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			2,6	1,83	
6.	Persentase PPID yang aktif	-		75	100	Jumlah PPID yang aktif .....100 % Jumlah PPID
7.	Persentase KIM yang aktif	-		68,2	107,7	Jumlah KIM yang aktif .....100 % Jumlah KIM
8.	Persentase wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi	-		80	89,77	Jumlah dusun yang terlayani jaringan telekomunikasi .....x100 % Jumlah dusun
9.	Jumlah data sectoral yang disertai metadata dan didesiminasi	-		280	-	Jumlah data sectoral yang disertai metadata dan didesiminasi

10	Jumlah SDM Pemda yang memiliki kualifikasi teknis terkait penyelenggaraan statistic sectoral	-		65	-	Jumlah SDM Pemda yang memiliki kualifikasi teknis terkait penyelenggaraan statistic sectoral
11	Jumlah Infrastruktur data sarana akses dan bagi pakai data	-		1	-	Jumlah Infrastruktur data sarana akses dan bagi pakai data
12	Indeks keamanan pemerintah daerah	-		Tingkat I	Tingkat II	Indeks keamanan pemerintah daerah
13	Persentase desa yang terjangkau sarana telekomunikasi	-		82	70,27	Jumlah Desa yang terjangkau sarana telekomunikasi .....x 100 % Jumlah Desa
14	Persentase desa yang menggunakan Website Desa	-		60 %	9,87	Jumlah Desa yang Menggunakan Website .....x 100 % Jumlah Desa
15			Persentase Layanan Sistem Informasi Terkait program dan kebijakan pemerintah yang berkualitas	100	100	Jumlah Layanan Sistem Informasi Terkait program dan kebijakan pemerintah yang berkualitas .....x 100 % Jumlah Layanan
16			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	Jumlah layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi .....x 100 Jumlah layanan publik
17			Persentase Perangkat daerah yang menggunakan data statistic dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	Jumlah Perangkat daerah yang menggunakan data statistic dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah .....x 100 % Jumlah Perangkat daerah
18			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi Pembangunan daerah	100	100	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi Pembangunan daerah .....x 100 % Jumlah Perangkat Daerah
19			Persentase Keamanan Informasi Pemerintah	Tingkat I	Tingkat II	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

- Untuk indikator Nilai Sakip OPD telah dilakukan pengukuran oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Tahun 2022 yang dinilai dengan Nilai CC.
- Untuk Indikator Laporan Keuangan OPD sesuai SAP telah dilakukan pengukuran pada Tahun 2023 terhadap Laporan Keuangan Tahun 2022 dengan nilai Sesuai.
- Untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Kominfo SP menunjukkan realisasi 75,13% untuk 3 (tiga) layanan yaitu Ketersediaan Telepon / Internet, Informasi Publik dan Transparansi Publik. Untuk pelayanan ketersediaan Telepon / Internet, Pelayanan Informasi Publik dan Transparansi Publik telah mencapai target karena beberapa daerah telah terjangkau jaringan telekomunikasi.
- Perangkat daerah yang mampu menerapkan proses digitalisasi pelayanan publik Tahun 2022 ditargetkan 30 % atau 11 OPD dan terealisasi 100 % atau 37 (Tiga Puluh Tujuh) OPD. Tercapainya target disebabkan karena pada Bulan Semester I Tahun 2023, Semua OPD telah menggunakan Layanan TTE (Tanda Tangan Elektronik) dengan tujuan untuk mengefisienkan proses administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar. Di samping pada beberapa OPD terdapat Layanan Publik lainnya antara lain: Sekretariat Daerah ( LPSE), Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Layanan Perizinan : Simpelnaker, OSS, Si Cantik), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Layanan Kependudukan), Dinas Kesehatan ( Layanan Rujukan) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian (SP4N LAPOR).
- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk Tahun 2022 yaitu 1,83.

- Untuk indikator PPID yang aktif ditargetkan 75 % (27 PPID) dan terealisasi 100 % (37) PPID yaitu PPID Pembantu pada semua Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah aktif pada Tahun 2023.
- Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif ditargetkan 34,1 % (13 KIM) dan terealisasi 107,7% (14 KIM) yaitu KIM maju Bersama Desa Parak Kecamatan Bontomanai, KIM Assamaturu Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu, KIM Kontutoje Kelurahan Batangmata Sapo Kecamatan Bontomatene, KIM Bontobangun Kecamatan Bontoharu, KIM Minasa Baji Kecamatan Pasimarannu, KIM Harapan Jaya Kecamatan Bontosikuyu, KIM Buki Harapan Kecamatan Buki, KIM Benteng Selatan Kecamatan Benteng, KIM Kembang Ragi Jaya Kecamatan Pasimarannu, KIM Ujung berlayar Kecamatan Pasimasunggu Timur, KIM Timur Jaya Kecamatan Pasilambena, KIM Sipainga Kecamatan Bontomanai, KIM Karya Bersama Kecamatan Bontomatene, dan KIM Bontosunggu Kecamatan Bontoharu. Capaian target disebabkan karena Masyarakat mulai memahami pentingnya akses informasi dan jangkauan jaringan telah merata di beberapa tempat sehingga akses informasi telah dapat dilakukan dengan cepat.
- Persentase wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi ditargetkan 80 % atau 290 Dusun, dan terealisasi 108,9 % atau 316 Dusun dengan Jumlah dusun dengan signa
- l yang kuat sebanyak 131, yang lemah sebanyak 185 Dusun dan yang blankspot sebanyak 51 Dusun.
- Jumlah data sectoral yang disertai metadata dan dideseminasi untuk TW I Tahun 2003 belum ada capaian karena kegiatan belum dilaksanakan.
- Jumlah SDM Pemda yang memiliki kualifikasi teknis terkait penyelenggaraan statistic sectoral untuk TW I Tahun 2003 belum ada capaian karena kegiatan belum dilaksanakan.



- Jumlah Infrastruktur data sarana akses dan bagi pakai data untuk TW I Tahun 2003 belum ada capaian karena kegiatan belum dilaksanakan.
- Indeks keamanan Pemerintah Daerah pada TW II Tahun 2023, capaiannya ada pada nilai 62,5 atau Tingkat dua, dari delapan area keamanan yang dinilai terdapat 5 area keamanan yang terlaksana yaitu Tata Kelola dengan nilai 84, Pengelolaan Resiko dengan nilai 48, Kerangka kerja keamanan informasi dengan nilai 63, pengelolaan asset dengan nilai 88, teknologi dan keamanan informasi dengan nilai 80.
- Persentase Desa yang terjangkau sarana telekomunikasi dari target 82 % atau 66 Desa terealisasi 73 Desa atau 90,12 %.
- Persentase Desa yang menggunakan website Desa dari target 60 % atau 74 Desa hanya terealisasi 8 Desa atau 9,87 %, hal disebabkan karena masih terbatasnya sumber daya perangkat dan tenaga yang kompeten di Desa terkait penggunaan system elektronik dan teknologi informasi.
- Persentase layanan system informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang berkualitas, untuk triwulan II Tahun 2023 dari target 7 Layanan terdapat 7 Layanan system informasi yaitu Youtube (kominfo selayar), Facebook (@kepulauan\_selayar), Instagram (@kepulauan selayar), Website ([www.kepulauanselayar.go.id](http://www.kepulauanselayar.go.id)), Twitter (@kep\_selayar), Tiktok (@humas.selayar), Snackvideo (humaskominfose) atau 100 %.
- Persentase layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi, terdapat 18 Perangkat Daerah yang memiliki system elektronik yang semuanya dilaksanakan secara online dan terintergrasi.
- Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistic dalam Menyusun perencanaan Pembangunan daerah triwulan II adalah semua perangkat daerah atau 100 %

- Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi Pembangunan daerah triwulan II adalah semua perangkat daerah atau 100 %
- Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Triwulan II adalah 62,5 %

## 2.1. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2021-2026 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu 5 Tahun ke depan adalah :

***“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”***

Adapun rumusan pemaknaan visi tersebut adalah :

**Bandar Maritim** : seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki Kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar muat barang serta perdagangan barang, jasa dan industri.

**Kawasan Timur Indonesia** : Berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistic yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah bagian Timur, Maluku dan Maluku Utara.

Mengacu pada Visi tersebut maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Periode 5 (Lima) Tahun RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel Dan Transparan

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Misi 4 : Meningkatkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman

Misi 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Misi 6 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yaitu :

**Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan**

Pada Misi 1 ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih professional, bermutu dan akuntabel menuju tata Kelola yang baik melalui penyelenggaraan e-Government. Selain telaahn terhadap visi dan misi yang diuraikan di atas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian juga memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program-program kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

**Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan**

Pada misi ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diharapkan mampu meningkatkan layanan telekomunikasi desa dalam upaya meningkatkan klasifikasi dan kualifikasi desa menjadi desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri menghadapi era digitalisasi.

Dengan memperhatikan berbagai peluang dan tantangan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain :

1. Pengembangan data center yang menjadi pusat data Pemerintah

Daerah kabupaten Kepulauan Selayar dalam Portal Satu data Selayar.

2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah.
3. Pengembangan implementasi e-Government Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Pengembangan penyediaan layanan informasi website online.
5. Pengembangan jaringan telekomunikasi data yang aman.
6. Pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat, yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab.
7. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.
8. Pengembangan sumberdaya aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah yang menguasai teknologi informasi.

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada Anggaran Perubahan Tahun 2023 sebanyak 5 program, dijabarkan dalam 11 kegiatan dan 43 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

Anggaran Kegiatan Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp.5.980.821.664 (Lima Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 3.541.989.364 (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.880.000, dengan Sub Kegiatan :
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah)
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.250.000 (juta Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.630.000 (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah)

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.709.797.564 dengan sub kegiatan :
- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.694.618.564 (Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah)
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.929.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
  - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.750.000 (Dua Juta Tujuh ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 424.164.000 (Empat ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah), dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran alokasi sebesar Rp. 72.124.000 (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran alokasi sebesar Rp. 73.747.000 (Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
  - Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran Rp. 2.930.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 275.363.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.257.157.800 (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah),

sengan sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.234.000 (dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 64.300.000 (enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah)
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 164.623.800 (seratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.130.990.000 (seratus tiga puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.630.000 (empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.890.000 (tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.470.000 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.264.979.300 (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.264.979.300 (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) dengan sub kegiatan :
- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.054.000 (empat belas juta lima puluh empat ribu rupiah)



- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.332.000 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
  - Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan alokasi anggaran Rp.852.085.300 (delapan ratus lima puluh dua juta delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
  - Pelayanan Informasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 330.402.000 (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus dua ribu rupiah)
  - Layanan Hubungan Media dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.010.000 (tujuh belas juta sepuluh ribu rupiah)
  - Kemitraan dengan Pemangku kepentingan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.096.000 (tiga puluh juta Sembilan puluh enam ribu rupiah)
2. Program Aplikasi Informatika dengan alokasi anggaran Rp. 1.173.853.000 (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dengan kegiatan :
- a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.877.752.000 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan sub kegiatan :
    - Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.069.000 (satu juta enam puluh Sembilan ribu rupiah)
    - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 876.683.000 (delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)
  - b. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.296.101.000 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu seratus satu ribu rupiah) dengan sub kegiatan :
    - Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 15.703.000 (lima belas juta tujuh ratus tiga ribu rupiah)

- Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.833.000 (tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 189.703.000 (seratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah)
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.862.000 (lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah)

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan alokasi anggaran sebesar Rp108.632.500 (seratus delapan juta enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus rupiah) dengan kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp108.632.500 (seratus delapan juta enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus rupiah) dengan sub kegiatan :
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.267.500 (tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
  - Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.784.000 (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
  - Membangun Metadata Statistik Sektoral dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.354.000 (enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)
  - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.768.000 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

- Pengembangan Infrastruktur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.736.000 (lima belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
  - Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektor di Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.723.000 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.115.733.600 (seratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), dengan kegiatan :
- a. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.977.600 (dua puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan sub kegiatan :
    - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.168.000 (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah)
    - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.939.600 (satu juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah).
    - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.722.000 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah)
    - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.148.000 (sepuluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah)
  - b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
    - Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 86.756.000 (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Tabel 3.1

## REKAPITULASI PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

<b>RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKPA-BELANJA SKPD</b>
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA															
2 16					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
2 16 01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
2 16 01 2.01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)															
2 16 01 2.01 01					Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)															
2 16 01 2.01 02					Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)															
2 16 01 2.01 03					Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)															
2 16 01 2.01 04																				

2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kelurahan		2,250,000	0	0	0	2,250,000	2,250,000	0	0	0	2,250,000	0	
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Dana Transfer	Kab. Kepulauan Selayar,		3,630,000	0	0	0	3,630,000	3,630,000	0	0	0	3,630,000	0	
					<b>Jumlah</b>															
<b>Kode</b>					<b>Uraian</b>	<b>Sumber Dana</b>	<b>Lokasi</b>	<b>T-1</b>	<b>T (Sebelum Perubahan)</b>					<b>T (Setelah Perubahan)</b>					<b>Bertambah/ (Berkurang)</b>	<b>T+1</b>
									<b>Belanja Operasi</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>Jumlah</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14 = (10+11+12+13)</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19 = (15+16+17+18)</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Umum-Dana Alokasi Umum	Benteng, Semua Kelurahan													
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kelurahan		4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>2,709,779,764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,709,779,764</b>	<b>2,709,797,564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,709,797,564</b>	<b>17.800</b>	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng		2,694,600,764	0	0	0	2,694,600,764	2,694,618,564	0	0	0	2,694,618,564	17.800	
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,929,000	0	0	0	2,929,000	2,929,000	0	0	0	2,929,000	0	

2	16	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2,750,000	0	0	0	2,750,000	2,750,000	0	0	0	2,750,000	0	
2	16	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>237,616,600</b>	<b>37,923,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275,539,600</b>	<b>352,040,000</b>	<b>72,124,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424,164,000</b>	<b>148.624.400</b>	
<b>Jumlah</b>																					
<b>Kode</b>					<b>Uraian</b>	<b>Sumber Dana</b>	<b>Lokasi</b>			<b>T (Sebelum Perubahan)</b>					<b>T (Sesudah Perubahan)</b>					<b>Bertambah/ (Berkurang)</b>	<b>T+1</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14 = (10+11+12+13)</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19 = (15+16+17+18)</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kelurahan		0	37,923,000	0	0	37,923,000	0	72,124,000	0	0	72,124,000	34.201.000		
2	16	01	2.06	05	Penyediaan BarangCetakan dan Peggandaan (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		48,903,600	0	0	0	48,903,600	73,747,000	0	0	0	73,747,000	24.843.400		
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kelurahan		2,930,000	0	0	0	2,930,000	2,930,000	0	0	0	2,930,000	0		
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		185,783,000	0	0	0	185,783,000	275,363,000	0	0	0	275,363,000	89.580.000		
2	16	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah</b>				<b>270,957,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270,957,800</b>	<b>257,157,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257,157,800</b>	<b>(13.800.000)</b>		
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28,234,000	0	0	0	28,234,000	28,234,000	0	0	0	28,234,000	0		
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kelurahan		64,300,000	0	0	0	64,300,000	64,300,000	0	0	0	64,300,000	0		

2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		178,423,800	0	0	0	178,423,800	164,623,800	0	0	0	164,623,800	(13.800.000)	
2	16	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>125,910,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125,910,000</b>	<b>130,990,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,990,000</b>	<b>5.080.000</b>	
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Dana Transfer	Kab. Kepulauan Selayar, Semua		45,270,000	0	0	0	45,270,000	41,630,000	0	0	0	41,630,000	(3.640.000)	
									<b>Jumlah</b>											
<b>Kode</b>					<b>Uraian</b>	<b>Sumber Dana</b>	<b>Lokasi</b>	<b>T-1</b>	<b>T (Sebelum Perubahan)</b>					<b>T (Setelah Perubahan)</b>					<b>Bertambah/ (Berkurang)</b>	<b>T+1</b>
									<b>Belanja Operasi</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>Jumlah</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14 = (10+11+12+13)</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19 = (15+16+17+18)</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
					Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan, Semua Kelurahan													
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75,890,000	0	0	0	75,890,000	75,890,000	0	0	0	75,890,000	0	
2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kelurahan		4,750,000	0	0	0	4,750,000	13,470,000	0	0	0	13,470,000	8.720.000	
2	16	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DANKOMUNIKASI PUBLIK</b>				<b>1,169,600,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,169,600,300</b>	<b>1,214,979,300</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,264,979,300</b>	<b>95.379.000</b>	
2	16	02	2.01		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>1,169,600,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,169,600,300</b>	<b>1,214,979,300</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,264,979,300</b>	<b>95.379.000</b>	
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14,054,000	0	0	0	14,054,000	14,054,000	0	0	0	14,054,000	0	

2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,932,000	0	0	0	30,932,000	21,332,000	0	0	0	21,332,000	(9.600.000)	
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		867,085,300	0	0	0	867,085,300	852,085,300	0	0	0	852,085,300	(15.000.000)	
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik (DINAS KOMUNIKASI,	Dana Transfer Umum-Dana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,		205,623,000	0	0	0	205,623,000	280,402,000	50,000,000	0	0	330,402,000	124.779.000	
<b>Jumlah</b>																				
<b>Kode</b>					<b>Uraian</b>	<b>Sumber Dana</b>	<b>Lokasi</b>		<b>T (Sebelum Perubahan)</b>					<b>T (Setelah Perubahan)</b>					<b>Bertambah/ (Berkurang)</b>	<b>T+1</b>
								<b>T-1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>Jumlah</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14 = (10+11+12+13)</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19 = (15+16+17+18)</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
					INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Alokasi Umum	Semua Kelurahan													
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17,010,000	0	0	0	17,010,000	17,010,000	0	0	0	17,010,000	0	
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34,896,000	0	0	0	34,896,000	30,096,000	0	0	0	30,096,000	(4.800.000)	
2	16	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>				<b>1,209,214,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,209,214,200</b>	<b>1,173,853,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,173,853,000</b>	<b>(35.361.200)</b>	
2	16	03	2.01		<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>913,113,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>913,113,200</b>	<b>877,752,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>877,752,000</b>	<b>(35.361.200)</b>	
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,709,000	0	0	0	30,709,000	1,069,000	0	0	0	1,069,000	(29.640.000)	



2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng		882,404,200	0	0	0	882,404,200	876,683,000	0	0	0	876,683,000	(5.721.200)	
2	16	03	2.02		<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>296,101,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296,101,000</b>	<b>296,101,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296,101,000</b>	<b>0</b>	
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15,703,000	0	0	0	15,703,000	15,703,000	0	0	0	15,703,000	0	
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dana Transfer Umum-Dana	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kelurahan		34,833,000	0	0	0	34,833,000	34,833,000	0	0	0	34,833,000	0	
					(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Alokasi Umum							<b>Jumlah</b>							
					<b>Kode</b>	<b>Sumber</b>	<b>Lokasi</b>					<b>T (Sebelum Perubahan)</b>					<b>T (Setelah Perubahan)</b>			
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar,	T-1	Belanja Operasi 189,703,000	Belanja Modal 0	Belanja Tidak Terduga 0	Belanja Transfer 0	Jumlah 189,703,000	Belanja Operasi 189,703,000	Belanja Modal 0	Belanja Tidak Terduga 0	Belanja Transfer 0	Jumlah 189,703,000	Bertambah/ (Berkurang) 0	T+1
1	2	3	4	5	(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Alokasi Umum	Benteng, Semua Kelurahan	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kelurahan		55,862,000	0	0	0	55,862,000	55,862,000	0	0	0	55,862,000	0	
2	20				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				<b>108,632,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108,632,500</b>	<b>108,632,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108,632,500</b>	<b>0</b>	
2	20	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>				<b>108,632,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108,632,500</b>	<b>108,632,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108,632,500</b>	<b>0</b>	
2	20	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>108,632,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108,632,500</b>	<b>108,632,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108,632,500</b>	<b>0</b>	
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		43,867,500	0	0	0	43,867,500	34,267,500	0	0	0	34,267,500	(9.600.000)	

2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											20,784,000	0	0	0	20,784,000	20,784,000	0	0	0	20,784,000	0	
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												6,354,000	0	0	0	6,354,000	6,354,000	0	0	0	6,354,000	0
2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												10,368,000	0	0	0	10,368,000	17,768,000	0	0	0	17,768,000	7.400.000
2	20	02	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												15,736,000	0	0	0	15,736,000	15,736,000	0	0	0	15,736,000	0
									<b>Jumlah</b>																				
<b>Kode</b>					<b>Uraian</b>			<b>Sumber Dana</b>	<b>Lokasi</b>	<b>T-1</b>	<b>T (Sebelum Perubahan)</b>					<b>T (Setelah Perubahan)</b>					<b>Bertambah/ (Berkurang)</b>	<b>T+1</b>							
											<b>Belanja Operasi</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>Jumlah</b>									
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>			<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14 = (10+11+12+13)</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19 = (15+16+17+18)</b>	<b>20</b>	<b>21</b>							
2	20	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												11,523,000	0	0	0	11,523,000	13,723,000	0	0	0	13,723,000	2.200.000
2	21				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>						<b>70,673,600</b>	<b>45,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115,673,600</b>	<b>115,733,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115,733,600</b>	<b>60.000</b>							
2	21	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIANUNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>						<b>70,673,600</b>	<b>45,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115,673,600</b>	<b>115,733,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115,733,600</b>	<b>60.000</b>							
2	21	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Persandian untuk PengamananInformasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>49,889,600</b>	<b>45,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,889,600</b>	<b>28,977,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,977,600</b>	<b>(65.912.000)</b>							
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												4,702,000	0	0	0	4,702,000	3,168,000	0	0	0	3,168,000	(1.534.000)

2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,939,600	45,000,000	0	0	46,939,600	1,939,600	0	0	0	1,939,600	(45.000.000)		
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33,100,000	0	0	0	33,100,000	13,722,000	0	0	0	13,722,000	(19.378.000)		
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,148,000	0	0	0	10,148,000	10,148,000	0	0	0	10,148,000	0		
2	21	02	2.02		<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>20,784,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,784,000</b>	<b>86,756,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,756,000</b>	<b>65.972.000</b>		
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi	Dana Transfer	Kab. Kepulauan Selayar, Semua		20,784,000	0	0	0	20,784,000	86,756,000	0	0	0	86,756,000	65.972.000		
					<b>Jumlah</b>																
<b>Kode</b>					<b>Uraian</b>	<b>Sumber Dana</b>	<b>Lokasi</b>	<b>T-1</b>	<b>T (Sebelum Perubahan)</b>					<b>T (Setelah Perubahan)</b>					<b>Bertambah/ (Berkurang)</b>	<b>T+1</b>	
									<b>Belanja Operasi</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>Jumlah</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14 = (10+11+12+13)</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19 = (15+16+17+18)</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	
					Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN)	Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan, Semua Kelurahan														

## BAB IV

### PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023 sampai bulan Juni 2023 Triwulan II (semester I) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Perubahan Sasaran dan Target setelah di Reviu Renstra adalah sesuai Perwal Perbaikan Kinerja sebagai sasaran dan indikator yang digunakan.

Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Untuk perhitungan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan standarisasi harga barang dan jasa yang ada di SIPD Kemendagri yang sudah di update oleh Instansi yang berwenang.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat tahun 2023 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan ada penambahan pagu indikatif sebesar **Rp. 200.000.000,-** atau **3,46 %** dari anggaran semula murni Rp.**5.780.881.664,-** menjadi anggaran perubahan Rp.**5.980.821.664,-** perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan DPA Perubahan (DPPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023.

Benteng, Agustus 2023  
Kepala Dinas,

Drs. AHMAD YANI  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19670312 199203 1 004

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
BAB II : EVALUASI RENJA DISKOMINFOSP SAMPAI TRIWULAN II.....	10
2.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFOSP TAHUN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....	10
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISKOMINFOSP.....	27
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DISKOMINFOSP.....	33
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISKOMINFOSP.....	36
BAB V : PENUTUP.....	50